

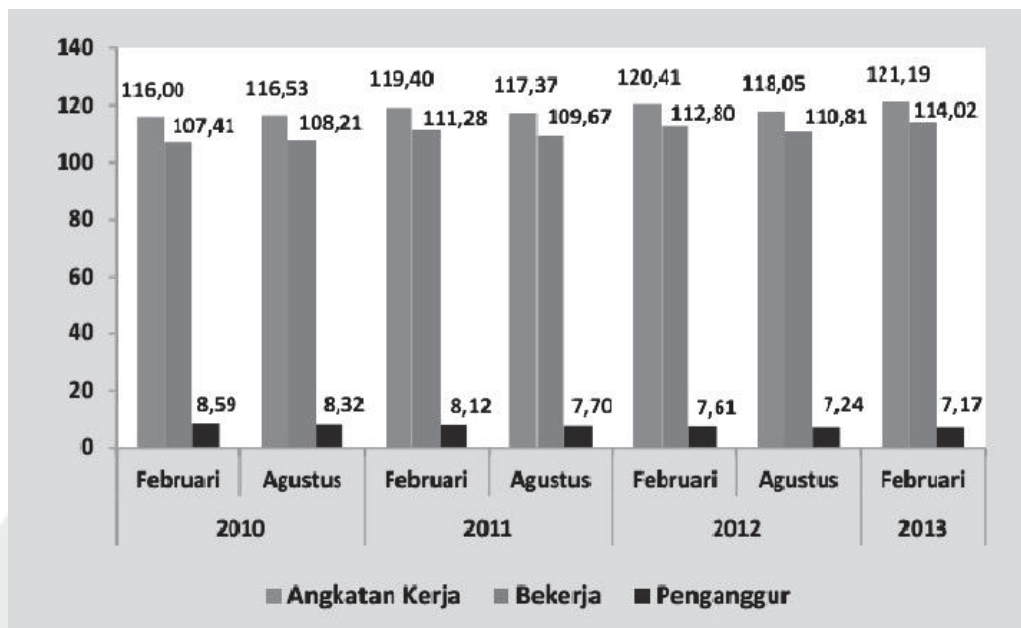
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Kesempatan kerja merupakan salah satu indikator pembangunan ekonomi . Ketika kesempatan kerja tinggi, pengangguran akan rendah dan ini akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Kesempatan kerja dapat dilihat dari banyaknya jumlah orang yang diterima bekerja dan tersedianya lapangan pekerjaan. Pentingnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat adalah sebagai sumber penghidupan untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari. Lapangan pekerjaan yang tersedia biasanya hanya terbatas, sehingga untuk mendapatkannya relatif semakin sulit. Hal Ini akan menimbulkan kesenjangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, sehingga berdampak pada pengangguran.

Gambar 1.1 di bawah ini menunjukkan perkembangan angkatan kerja dan pengangguran di Indonesia tahun 2010 – 2013. Berdasarkan gambar 1.1, dari tahun 2010 sampai dengan 2013 terlihat bahwa jumlah angkatan kerja di Indonesia rata rata mengalami peningkatan, setiap tahunnya jumlah orang yang bekerja rata rata juga mengalami peningkatan, tetapi jumlah orang yang menganggur tidak berubah secara signifikan. Kesenjangan yang terjadi dalam dapat dilihat dari perbedaan jumlah angkatan bekerja dan jumlah orang yang bekerja, kesenjangan ini akan berdampak pada pengangguran. Hal ini membuktikan bahwa pengangguran di Indonesia masih ada dan angkanya relatif cukup tinggi.



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 1.1
Jumlah Angkatan Kerja, Bekerja, dan Pengangguran di Indonesia (Tahun 2010-2013)

Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia menjadi suatu masalah yang krusial. Untuk mengurangi tingkat pengangguran yang relatif tinggi, maka pemerintah perlu meningkatkan kegiatan perekonomian atau pertumbuhan ekonomi di daerah masing-masing. Ukuran pertumbuhan perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari jumlah pendapatan yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan investasi yang merupakan bagian dari pendapatan (Samuelson dan Nordhaus, 1996). Meningkatnya pendapatan daerah akan meningkatkan permintaan barang dan jasa di masyarakat. Ini berarti memerlukan penambahan modal yang sudah ada dengan menambahkan proyek investasi. Meningkatnya tingkat pendapatan mengakibatkan meningkatnya jumlah

proyek investasi yang dilaksanakan oleh masyarakat (Todaro dan Stephen, 2003), atau bisa dikatakan permintaan tenaga kerja meningkat.

Selain meningkatkan PDRB, pemerintah juga harus memperhatikan tingkat kesejahteraan pekerja, di antaranya adalah pemberlakuan upah minimum sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang upah minimum. Besarnya Upah minimum ditentukan oleh : (i) Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), (ii) Indeks Harga Konsumen (IHK), (iii) Kemampuan perusahaan, pertumbuhannya, dan kelangsungannya, (iv) Kondisi pasar tenaga kerja, dan (v) Pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Pemberlakuan upah minimum ini dilaksanakan setiap tahunnya berdasarkan tingkat dan harga kebutuhan masyarakat pada saat itu. Tujuan dari penetapan upah minimum adalah untuk mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja.

Kondisi perekonomian pada saat ini telah memungkinkan untuk penetapan upah yang realistis sesuai dengan tingkat kebutuhan masing masing daerah. Penetapan Upah Minimum mengacu kepada pemenuhan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Pemerintah menetapkan upah berdasarkan KHM dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Penetapan Upah minimum setiap tahun mengalami peningkatan, hal ini menyebabkan dilema tersendiri bagi perusahaan yang menganggap penentuan upah minimum terlalu tinggi. Upah mempunyai pengaruh terhadap kesempatan kerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya untuk menggaji tenaga kerja sehingga biaya produksi akan meningkat (Simanjutak, 1998). Biaya Produksi yang tinggi mengakibatkan

pengeluaran perusahaan menjadi semakin besar sehingga tidak efisien. Untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja, yang berakibat pada rendahnya tingkat kesempatan kerja dan naiknya angka pengangguran.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi terpadat penduduknya di Indonesia yaitu sekitar 34.674.870 jiwa (Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja Jawa Tengah, 2013). Salah satu masalah yang dihadapi Jawa Tengah adalah masalah ketenagakerjaan, baik itu pengangguran maupun kesempatan kerja. Tabel 1.1, menunjukan kondisi tenaga kerja di Jawa Tengah.

Tabel 1.1
Keadaan Tenaga Kerja Di Jawa Tengah
Tahun 2010 – 2013

No	Jenis Kegiatan	Periode			
		Agustus 2010	Agustus 2011	Agustus 2012	Agustus 2013
1	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas (Orang)	23.874.585	23.905.331	23.933.408	24.020.083
2	Angkatan Kerja (Orang)	16.856.330	16.918.797	17.095.031	16.986.776
	Bekerja (Orang)	15.809.447	15.916.135	16.132.890	15.964.048
	Pengangguran Terbuka (Orang)	1.046.883	1.002.662	962.141	1.022.728
3	Bukan Angkatan Kerja (Orang)	7.018.255	6.986.534	6.838.377	7.033.307
4	TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%))	70,6	70,77	71,43	70,72
5	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka (%))	6,21	5,93	5,63	6,02

Sumber : BPS Jawa Tengah, Keadaan Tenaga Kerja Jawa Tengah 2013, (Diolah).

Tabel 1.1 menjelaskan keadaan tenaga kerja di Jawa Tengah. Penyerapan angkatan kerja yang setiap tahunnya tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang bekerja. Dilihat dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), pada tahun

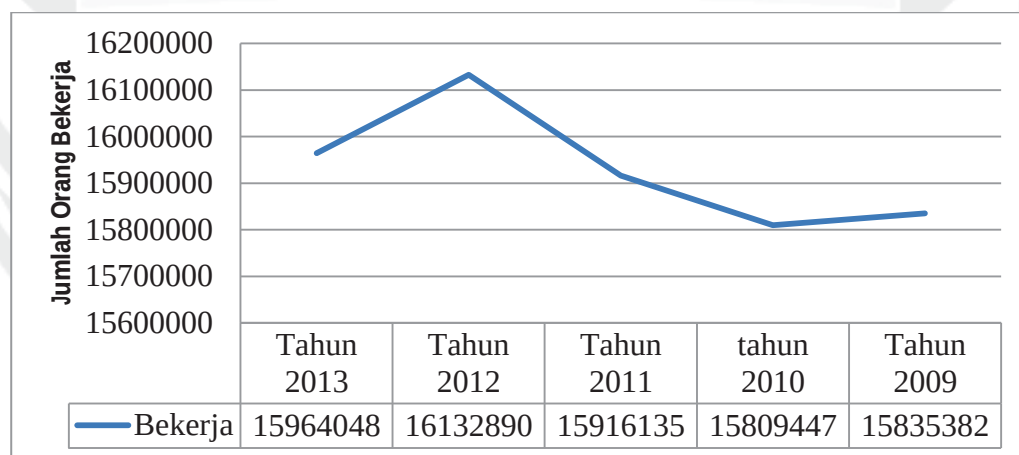
2010-2012 di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari 70,6%, 70,77% menjadi 71,43% dan penurun pada tahun 2013 menjadi 70,72%. Jumlah Pengangguran pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 962.141 jiwa menjadi 1.022.728. Naiknya angka pengangguran ini berarti kesempatan kerja di Jawa Tengah mengalami penurunan.

Ada beberapa hal yang mempengaruhi pengangguran di Jawa Tengah. Salah satu penyebab naiknya angka pengangguran yang terjadi pada tahun 2013 adalah permasalahan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) yang ditetapkan Pemerintah Jawa Tengah. Naiknya UMK di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah berdampak pada kesempatan kerja. Salah satunya adalah Kota Pekalongan, UMK Kota Pekalongan pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp. 980.000 per bulan dimungkinkan berdampak pada perusahaan berskala kecil, sehingga melakukan efisiensi atau pemutusan hubungan kerja sebagai upaya mempertahankan perusahaan tetap berproduksi (Saepudin, 2012). Tingginya UMK membuat sebagian perusahaan di Jawa Tengah keberatan karena diasumsikan bahwa ketika UMK naik maka biaya produksi menjadi semakin besar.

Penetapan Upah di Jawa Tengah menggunakan sistem pengupahan Upah Minimum Kabupaten/Kota. Jawa Tengah memiliki 30 Kabupaten dan 5 Kota, yang masing masing memiliki tingkat kebutuhan hidup minimum yang berbeda, sehingga penentuan upah minimum masing masing kabupaten dan kota pun juga berbeda sesuai dengan tingkat kehidupan hidup minimumnya.

Tahun 2013, penetapan UMK di Jawa Tengah sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Jateng Nomor 561.4/58 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2013. UMK Jateng tahun 2013 tertinggi adalah Kota Semarang sebesar Rp 1.209.100 per bulan dan terendah adalah Kabupaten Banjarnegara dan Kebumen sebesar Rp. 835.000 per bulan. Kenaikan UMK rata-rata sebesar 9,55% atau Rp 80.020 per bulan jika dibanding tahun 2012.

Penetapan UMK di Jawa Tengah setiap tahunnya yang terus mengalami peningkatan, berdampak pada jumlah kesempatan kerja di Jawa Tengah. Gambar 1.2 menunjukkan fluktuasi atau perubahan jumlah kesempatan kerja pertahun dengan adanya perubahan UMK, hal ini berarti penentuan UMK di Jawa Tengah dimungkinkan memberikan dampak terhadap kesempatan kerja di Jawa Tengah.



Sumber : BPS Jawa Tengah , Jawa Tengah Dalam Angka 2014, (Diolah).

Gambar 1.2
Perubahan Kesempatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013

Penelitian terdahulu yang dilakukan Sholeh (2005) mengenai dampak kenaikan upah terhadap kesempatan kerja di provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan analisis input-output (I-O), menyimpulkan bahwa peningkatan upah

(melalui sisi penawaran) 16% maka akan membuka kesempatan kerja di Jawa Tengah sebanyak 738.249 orang. Berdasarkan Penelitian tersebut, penentuan upah minimum yang naik setiap tahunnya, akan menjamin upah yang layak bagi tenaga kerja. Upah yang naik akan mendorong produktifitas tenaga kerja, meningkatnya produktifitas akan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi suatu daerah , akan menciptakan terbukanya lapangan pekerjaan yang baru, sehingga kesempatan kerja akan tinggi.

Hutagalung dan Purbayu (2013), meneliti tentang analisis pengaruh upah minimum dan inflasi terhadap kesempatan kerja sektor industri pengolahan besar dan sedang di Jawa Tengah (35 Kab/Kota), menyimpulkan bahwa upah minimum secara signifikan berpengaruh terhadap kesempatan kerja, jika upah minimum meningkat maka kesempatan kerja di kabupaten / kota di Jawa Tengah meningkat. Variabel inflasi tidak mempengaruhi kesempatan kerja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini akan menganalisis Bagaimana Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) riil dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil mempengaruhi kesempatan kerja di Jawa Tengah.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu diketahui bagaimana Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) riil dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil berpengaruh terhadap besarnya Kesempatan Kerja di Jawa Tengah Tahun 2009 - 2013?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) riil dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil terhadap kesempatan kerja di Jawa Tengah tahun 2009 - 2013.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana bagi penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi khususnya di bidang ekonomi sumber daya manusia.

2. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan ataupun referensi serta sebagai bahan pemikiran dan pembanding untuk penelitian yang sejenis.

1.5. Hipotesis

- a) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) riil dan Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Riil secara bersama sama berpengaruh terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Tengah.
- b) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) riil berpengaruh negatif terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Tengah.
- c) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Riil berpengaruh positif terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Tengah.

1.6. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Pendahuluan membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta hipotesis.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II ini akan membahas mengenai landasan teori yang terkait dengan penelitian.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, alat analisis yang dipakai oleh penulis.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini penulis akan membahas tentang hasil persamaan regresi yang sudah diestimasi. Tahap pengujian yang dilakukan meliputi uji F, uji t, dan akan dilihat besarnya koefisien determinasi.

BAB V Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil estimasi, serta saran untuk penelitian kedepannya.